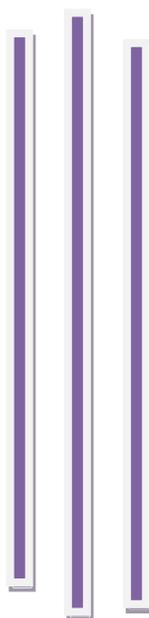




# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

## **LAPORAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**TAHUN ANGGARAN 2024**

## KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan maka disusunlah Laporan Keuangan setiap tahun . Materi Laporan Keuangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini pada dasarnya memuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kami menyadari bahwa di dalam Laporan Keuangan ini tentunya masih terdapat kekurangan baik materi maupun penyajiannya karenanya dengan kerendahan hati kami meminta segenap sumbang saran yang bersifat konstruktif sehingga selanjutnya akan lebih sempurna.

Demikian laporan ini disampaikan atas kerjasama semua pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih

Tarutung, 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI  
UTARA,**

**HENDRIK TARUNA,S.STP,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19780126 199612 1001**

## DAFTAR ISI

Halaman

---

<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1.	Gambaran Umum OPD .....	1 - 1
1.2.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1 -2
1.3.	Landasan Hukum Laporan Keuangan .....	1 -5
1.4.	Sistematika Penulisan .....	1 -6
<b>BAB II.</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
2.1.	Entitas Pelaporan/ Entitas Akuntansi Keuangan Daerah OPD .....	II - 1
2.2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	II - 1
2.3.	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	II- 1
2.4.	Pendapatan .....	II- 2
2.5.	Belanja.....	II- 2
2.6.	Aset .....	II- 3
2.7.	Kewajiban.....	II- 4
2.8.	Ekuitas .....	II- 4
2.9.	Sisa Lebih/ Kurang .....	II- 4
<b>BAB III.</b>	<b>PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN OPD</b>	
3.1.	Rincian dari Penjelasan Setiap POS – POS Pelaporan Keuanagn OPD.....	III- 1
3.1.1	Pendapatan .....	III- 1
3.1.2	Belanja .....	III- 1
3.2.	Penjelasan atas Pos – Pos Neraca .....	III- 2
3.2.1.	Aset Lancar .....	III- 2
3.2.2.	Investasi Jangka Panjang.....	III- 2
3.2.3.	Aset Tetap .....	III- 2
3.2.4.	Aset Lainnya.....	III- 3
3.2.5.	Kewajiban.....	III-3

3.2.6. Ekuitas.....	III-3
3.3. Laporan Operasional (LO).....	III-4

#### BAB IV. PENUTUP

##### LAMPIRAN

1. NERACA
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
3. DAFTAR INVENTARIS BARANG TAHUN 2024
4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **Kedudukan :**

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksanaan tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Tugas :**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok sebagai berikut : ***Membantu Bupati Tapanuli Utara dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.***

#### **Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Profil Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022, terdiri dari (a). Kepala Dinas (Eselon II.b), dibantu :

(b). Sekretaris Dinas (Eselon III.a) membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan (Eselon IV.a),
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.a).
- pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 3 Kepala Bidang diantaranya :
- (c). Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi (Eselon III.b)
  - (d). Kepala Bidang Aplikasi dan informatika (Eselon III.b)
  - (e). Kepala Bidang Persandian dan Statistik (Eselon III.b)
  - (f). Kelompok Jabatan Fungsional
  - (f). Kelompok Jabatan Pelaksana

### Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2024 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang , yang terdiri dari :

#### 1) Menurut Jabatan dan Fungsi :

- Pejabat Eselon II.b : 1 orang
- Pejabat Eselon III.a : 1 orang
- Pejabat Eselon III.b : 3 orang
- Pejabat Eselon IV.a : 8 orang
- Staf PNS : 13 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan formal adalah :

- S-2 : 5 orang
- S-1 : 15 orang
- D-III : 4 orang
- D-II : - orang
- D-I : - orang

## 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitasnya dalam pengambilan keputusan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan dalam pelayanan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,

- b. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- d. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- e. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- b. Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
- c. Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- d. Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan, tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai dan wajar.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

**a. Akuntabilitas**

Yaitu dengan cara mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pemerintah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**b. Manajerial**

Yaitu dengan cara membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan suatu entitas pemerintah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan eukuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

**c. Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity)**

Yaitu dengan cara membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah yang datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**d. Transparansi**

Yaitu dengan cara memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyentuh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Komponen Laporan Keuangan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

**a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan, pembiayaan, pengeluaran pembiayaan neto dan silpa dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaiannya target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

**b. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net asset). Ekuitas dana merupakan selisih dari aset setelah dikurangi kewajiban, atau dalam persamaan akuntansi dapat dirumuskan :  
$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Dana}$$

**c. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

**d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

**e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan dimasukkan agar laporan dapat dipahami oleh pembaca secara luas tidak terbatas hanya pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Selain laporan keuangan pokok diatas, entitas pemerintah diperkenankan menggunakan laporan keuangan tambahan, yaitu laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

**1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD) ;
- j. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024;
- k. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Gambaran Umum OPD
- 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.4 Sistematika penulisan.

##### **BAB II Kebijakan Akuntansi**

##### **BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

##### **BAB IV Penutup**

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **2.1 Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Keuangan Daerah OPD**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan.

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

#### **2.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis kas (*cash basis*) berarti bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.

Basis akrual (*accrual basis*) berarti dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

#### **2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara belum menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah sehingga basis akuntansi dan basis pengukuran yang

digunakan masih mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP PP Nomor 24 Tahun 2005).

## 2.4 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima, sementara itu pada akhir periode akuntansi pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, walaupun sampai akhir periode akuntansi belum ada realisasi penerimaan kas.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

## 2.5 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari rekening kas daerah atau entitas pelaporan. Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi tersebut.

Klasifikasi belanja untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Secara umum, belanja dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Pengakuan belanja operasi dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Pengakuan atas belanja modal pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

## 2.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar terdiri dari aset tetap dan aset lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar diklasifikasikan sebagai aset lainnya termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan). Pengakuan atas aset lainnya adalah sebesar harga perolehan.

Pengakuan aset pada saat aset diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Berikut ini penjelasan ringkas masing-masing komponen yang termasuk dalam aset lancar, yaitu :

- Kas dan setara kas

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah, setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah.

Kas di daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank.

Kas di pemegang kas adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan per 31 Desember 2024.

- Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

- Persediaan

Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

- Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi yang dikelola oleh OPD adalah investasi jangka pendek misalnya berupa investasi dalam saham, obligasi, deposito dan surat berharga lainnya.

Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

Berikut ini penjelasan ringkas tentang aset tetap yaitu :

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah.
3. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
4. Depresiasi/penyusutan atas aktiva tetap tidak diberlakukan. Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan SK bupati.

## **2.7 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban yang dikelola oleh OPD adalah kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Komponen dari kewajiban jangka pendek adalah utang perhitungan pihak ketiga (PPK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka dan utang jangka pendek lainnya.

Pengakuan kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- a. Transaksi dengan pertukaran.
- b. Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah.
- d. Kejadian yang diakui pemerintah

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

## 2.8 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara total aset dengan total kewajiban. Ekuitas terdiri dari :

- Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan perundang-undangan.

## 2.9 Sisa lebih/Kurang

Sisa Lebih/Kurang adalah akumulasi surplus/dedisit dengan pembiayaan netto.

**BAB III****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD****3.1 Rincian dari Penjelasan Setiap Pos-Pos Pelaporan Keuangan OPD**

Rincian dari penjelasan setiap pos-pos pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari :

**3.1.1 Pendapatan**

**Pendapatan Asli Daerah**

**Rp. 0.000**

**3.1.2. Belanja**

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 3.736.417.327,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 3.736.417.327,00 dan belanja modal sebesar Rp. 0,00 Jika dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.892.234.591,00 atau 96,00% maka realisasi tidak melebihi pagu anggaran.

Rincian Realisasi Belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Belanja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun**  
**Anggaran 2023**

<b>Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.892.234.591,00</b>	<b>3.736.417.327,00</b>	<b>96,00</b>
Belanja Pegawai	2.538.510.741,00	2.434.387.272,00	95,90
Belanja Barang dan jasa	1.303.723.850,00	1.252.030.055,00	96,03
Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Aset tetap Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah BELANJA</b>	<b>6.166.646.391,00</b>	<b>3.736.417.327,00</b>	<b>96,00</b>

**Belanja Operasi**

Realisasi belanja operasional adalah merupakan seluruh pengeluaran untuk belanja gaji (belanja tidak langsung) dan honorarium dan belanja barang (belanja langsung) selama tahun 2024 sebesar Rp. **3.892.234.591.00** dari anggaran Rp.

**3.736.417.327,00** dan realisasi ini sebesar **96,00 %**

**Belanja Modal**

Realisasi belanja modal selama tahun 2024 sebesar Rp. **0,00** dari anggaran sebesar Rp. **0,00** atau realisasi sebesar **0 %**

**Silpa**

Berdasarkan surplus anggaran dan pembiayaan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa pembiayaan anggaran sebesar **Rp. 155.817.264,00**

<b>U R A I A N</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>BELANJA</b>	<b>3.892.234.591,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3.892.234.591,00)</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(155.817.264,00)</b>

**3.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca****3.2.1 Aset Lancar**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sejumlah **Rp. 71.000,00** dan persediaan barang pakai habis (Alat Tulis Kantor) sebesar Rp. **71.000,00** daftar persediaan terlampir.

**3.2.2 Investasi Jangka Panjang**

Jumlah Investasi Jangka Panjang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 0**

**3.2.3 Aset Tetap**

Nilai aset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 2.183.159.842** yang terdiri dari :

Tanah	Rp. 398.000.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp. 4.448.075.690,00
Gedung dan Bangunan	Rp. 1.668.012.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 38.787.616,00
Aset Tetap Lainnya	Rp. 10.000.000,00

Konstruksi Dalam Pekerjaan	Rp	0,00
Akumulasi Penyusutan	Rp.	(4.407.159.842,00)

**a. Tanah Rp. 398.000.000,00**

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara terletak di Jln. Sisingamangaraja no.186 dan rumah dinas di Jl.Raja Johannes Hutabarat.

**b. Peralatan dan Mesin Rp. 4.476.075.690,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.476.075.690,00 peralatan mesin tersebut berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara (Daftar Inventaris Terlampir)

**c. Gedung dan Bangunan Rp. 1.668.012.000,00**

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara terletak di Jln. Sisingamangaraja No.186.

**d. Jalan, Irigasi dan Instalasi Rp. 38.787.616,00**

**e. Aset tetap lainnya Rp. 10.000.000,00**

**f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,00**

**g. Akumulasi Penyusutan Rp. (4.407.715.463,00)**

#### **3.2.4. Aset Lainnya**

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2024 berupa aset lainnya sebesar adalah **Rp. 235.942.279,00** sehingga adapun jumlah aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 235.942.279,00**

#### **3.2.5 Kewajiban**

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp. 0,00** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp.0,00**

#### **3.2.6 Ekuitas**

Ekuitas dana mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertahan dalam infestasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, di kurangi dengan kewajiban

jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 2.419.173.121,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Aset Lancar	Rp. 71.000,00
- Jumlah aset tetap	Rp. 2.183.159.842,00
- Jumlah aset lainnya	Rp. 235.942.279,00

### **3.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

#### **a. PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah pada saldo 2024 adalah Rp. 0,00

#### **b. PENDAPATAN TRANSFER**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan Tahun 2024 adalah 0

#### **c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya Tahun 2024 adalah 0

#### **d. BEBAN**

Beban Pegawai pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.434.387.272,00 dan untuk beban Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 1.223.981.055,00 dan Beban Hibah adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 328.258.355,00

Dari uraian tersebut maka Surplus/Defisit –LO adalah sebesar Rp. (4.036.626.682,00)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2024 dapat kami simpulkan sebagai berikut :

Jumlah realisasi belanja sebesar **Rp. 3.736.417.327,00** dimana realisasi belanja lebih kecil dengan target (anggaran) yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 3.892.234.591,00** atau terealisasi sebesar **96,00 %**.

Materi Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini pada dasarnya memuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dengan harapan mendapat perbaikan ke tahun –tahun mendatang.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**HENDRIK TARUNA,S.STP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19780126 199612 1001**



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>2.419.173.121,32</b>	<b>2.719.382.476,32</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>71.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
1.1.12	Persediaan	71.000,00	22.000,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>71.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>2.183.159.842,32</b>	<b>2.483.418.197,32</b>
1.3.01	Tanah	398.000.000,00	398.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.476.075.690,00	4.448.075.690,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.668.012.000,00	1.668.012.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.787.616,00	38.787.616,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.407.715.463,68)	(4.079.457.108,68)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2.183.159.842,32</b>	<b>2.483.418.197,32</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>235.942.279,00</b>	<b>235.942.279,00</b>
1.5.04	Aset Lain-lain	235.942.279,00	235.942.279,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>235.942.279,00</b>	<b>235.942.279,00</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.419.173.121,32</b>	<b>2.719.382.476,32</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>2.419.173.121,32</b>	<b>2.719.382.476,32</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>2.419.173.121,32</b>	<b>2.719.382.476,32</b>
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(4.036.626.682,00)	(5.742.508.183,26)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	3.736.417.327,00	5.349.060.334,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.419.173.121,32</b>	<b>2.719.382.476,32</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>2.419.173.121,32</b>	<b>2.719.382.476,32</b>

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
---------------	--------	------	------

Kab. Tapanuli Utara, 05-03-2025  
Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si  
NIP. 197801261996121001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2024  
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>7</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>720.320.000,00</b>	<b>(720.320.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>7.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>720.320.000,00</b>	<b>(720.320.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	0,00	720.320.000,00	(720.320.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>720.320.000,00</b>	<b>(720.320.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>720.320.000,00</b>	<b>(720.320.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>4.036.626.682,00</b>	<b>6.462.828.183,26</b>	<b>(2.426.201.501,26)</b>	<b>(37,54)</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>3.708.368.327,00</b>	<b>6.055.478.734,00</b>	<b>(2.347.110.407,00)</b>	<b>(38,76)</b>
8.1.01	Beban Pegawai	2.434.387.272,00	2.318.672.529,00	115.714.743,00	4,99
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.223.981.055,00	3.536.806.205,00	(2.312.825.150,00)	(65,39)
8.1.05	Beban Hibah	50.000.000,00	200.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>3.708.368.327,00</b>	<b>6.055.478.734,00</b>	<b>(2.347.110.407,00)</b>	<b>(38,76)</b>
<b>8.1.08</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>328.258.355,00</b>	<b>407.349.449,26</b>	<b>(79.091.094,26)</b>	<b>(19,42)</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	296.424.564,00	375.515.658,26	(79.091.094,26)	(21,06)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.864.101,00	30.864.101,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	969.690,00	969.690,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>328.258.355,00</b>	<b>407.349.449,26</b>	<b>(79.091.094,26)</b>	<b>(19,42)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>4.036.626.682,00</b>	<b>6.462.828.183,26</b>	<b>(2.426.201.501,26)</b>	<b>(37,54)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(4.036.626.682,00)</b>	<b>(5.742.508.183,26)</b>	<b>1.705.881.501,26</b>	<b>(29,71)</b>

Kab. Tapanuli Utara, 5 Maret 2025  
Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si  
NIP.197801261996121001



PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	2.719.382.476,32	2.939.458.177,55
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(4.036.626.682,00)	(5.742.508.183,26)
RK PPKD	3.736.417.327,00	5.349.060.334,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	173.372.148,03
EKUITAS AKHIR	2.419.173.121,32	2.719.382.476,32

Kab. Tapanuli Utara, 5 Maret 2025  
Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si  
NIP. 197801261996121001



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.320.000,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	720.320.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.320.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.320.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.892.234.591,00</b>	<b>3.736.417.327,00</b>	<b>96,00</b>	<b>6.069.380.334,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.892.234.591,00</b>	<b>3.736.417.327,00</b>	<b>96,00</b>	<b>6.055.230.334,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.538.510.741,00	2.434.387.272,00	95,90	2.318.672.529,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.723.850,00	1.252.030.055,00	96,03	3.536.557.805,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	200.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>3.892.234.591,00</b>	<b>3.736.417.327,00</b>	<b>96,00</b>	<b>6.055.230.334,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	14.150.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.892.234.591,00</b>	<b>3.736.417.327,00</b>	<b>96,00</b>	<b>6.069.380.334,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3.892.234.591,00)</b>	<b>(3.736.417.327,00)</b>	<b>96,00</b>	<b>(5.349.060.334,00)</b>

Kab. Tapanuli Utara, 05 Maret 2025  
Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si  
NIP. 197801261996121001